



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK C NO. 18 KAB. SIDRAP
KODE POS 91611

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 - 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026, maka dipandang perlu untuk menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005- 2025
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023;
17. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra Tahun 2024-2026) dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Melakukan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra Tahun 2024-2026)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya .

**Di tetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2023**

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

**Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M.Si
NIP. 19721209 199203 1 004**

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Nomor : Tahun 2022

Tanggal :

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BAPPELITBANGDA TAHUN 2024 - 2026
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
	Kepala Bappeda	Penanggungjawab	
	Sekretaris Bappeda	Ketua	
	Kasubag Perencanaan	Sekretaris	
	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, dan Pemerintahan	Anggota	
	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Pembangunan Manusia	Anggota	
	Kepala Bidang Penelitian & Pengembangan Daerah	Anggota	
	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota	
	Staf Sekretariat Bappeda	Anggota	

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M.Si
NIP. 19721209 199203 1 004

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat Karunia dan Ridhonya, Alhamdulillah telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Periode Tahun 2024-2026.

Dokumen Renstra ini disusun sebagai tindak lanjut dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bentuk implementasi dari Tugas pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dengan mempedomani pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024-2026, terdiri dari 8 (delapan) bagian pembahasan yang memuat pendahuluan, gambaran pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan indikator kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Akhirnya, besar harapan kami semoga Renstra Bappelitbangda ini dapat mendukung pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang digunakan sebagai acuan guna lebih meningkatkan kinerja program/kegiatan dan peran Bappelitbangda dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pangkajene Sidenreng ,
Kepala Bappelitbangda,

Drs. Andi Muhammad Arsjad, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
<u>DAFTAR ISI.....</u>	<u>ii</u>
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan.	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.....	I-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang.....	II-1
2.2. Sumber Daya Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.....	II-26
2.3. Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.....	II-32
2.4. Kelompok Sasaran Layanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.....	II-44
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.....	III-1
3.1. Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kab Sidrap	III-1
3.2. Penentuan Isu-isu Strategis Bappelitbangda kab Sidrap.....	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.	IV-1
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang..	IV-1
4.2 Cascading Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN	V-1
5.1. Strategi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.....	V-1
5.2. Arah Kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.....	V-2
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	VI-1
6.2. Rencana Kegiatan	VI-2
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG.....	
7.1. IKU	
7.2. IKK	
BAB VIII PENUTUP.....	VI

Tabel. 2.1.	Jumlah dan Distribusi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017.....	II-26
Tabel. 2.2.	PNS Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	II-28
Tabel.2.3.	PNS Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-29
Tabel. 2.4.	Daftar Inventaris Barang Bapeda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017	II-29
Tabel. 2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	II-34
Tabel. 2.6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	III-2
Tabel. 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang	IV-3
Tabel. 4.1.	Tujuan dan sasaran jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	V-3
Tabel. 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2024-2026	VI-6
Tabel. 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif BAPPELITBANGDA Kabupaten Sidenreng Rappang	VII-2
Tabel. 7.1	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	VII-3
Tabel. 7.2	Indikator Kinerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang	VII-4
Tabel. 7.3	Definisi Operasional Indikator Kinerja Beppellitbangda Kabupaten Sidrap	VII-5
Gambar 1.1.	Kerangka Pikir Penyusunan Rencana Strategis	I-2
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	II-25
Gambar 7.1.	Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang	VII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa kepala daerah berakhir tahun 2023, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Oleh karena itu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada tahun 2023 akan berakhir masa jabatan kepala daerah sehingga diperlukan kepastian hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga tahun 2026 yaitu melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai tindak lanjut dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi dokumen perencanaan kabupaten.

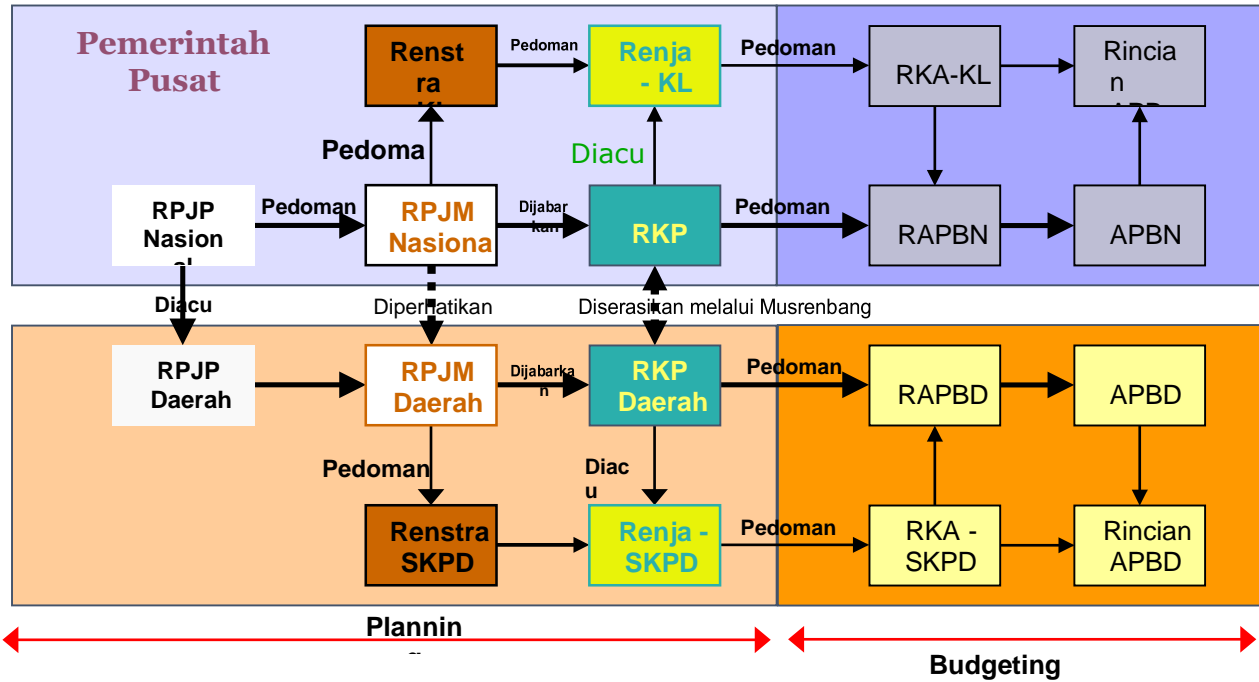
Sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri dalam Negeri No 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerin mencakup :

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
8. Penutup.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi

untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk 3 (tiga) tahun mendatang.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dan dilakukan review pula terhadap Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut :



Gambar I.1 Kerangka Pikir Penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemebentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesi Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Permendagri No 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 255);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang selama 3 (tiga) Tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan penyusunan renstra ini adalah :

1. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 ini adalah agar dapat :

1. Merumuskan gambaran umum sebagai dasar merumuskan masalah, isu strategis sebagai dasar prioritas selama 3 tahun bagi perangkat daerah
2. Rencana Strategis sebagai pedoman/dasar dalam Menyusun rencana kerja perangkat daerah
3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 berdasarkan kerangka pendanaan indikator

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, disusun melalui sistematika sebagai berikut.

- Bab I. Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- BAB II. Gambaran Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang**, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.
- BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang**, mengidentifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu-isu strategis Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.
- BAB IV. Tujuan dan Sasaran**, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang 2024 -2026 dan Cascading Kinerja mulai dari tujuan dengan outcome dan output.
- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan**, berisi strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran renstra bappelitbangda
- BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, mengemukakan indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

BAB VIII. Penutup, berisi ringkasan renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabuapten Sidenreng Rappang

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang.

	Tugas Pokok dan Fungsi
Jabatan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tugas Pokok	Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah
Jabatan	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tugas Pokok	Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan
Jabatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tugas Pokok	Mengumpulkan bahan dan melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Badan
Jabatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
Tugas Pokok	Mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan

Jabatan	Kepala Sub Bagian Keuangan
Tugas Pokok	Mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan, pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang
Jabatan	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Tugas Pokok	Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Jabatan	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Perencanaan dan Pendanaan
Tugas Pokok	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Penyusunan rencana kegiatan substansi Perencanaan dan Pendanaan pada substansi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan substansi Perencanaan dan Pendanaan pada substansi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan substansi Perencanaan dan Pendanaan pada substansi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas substansi Perencanaan dan Pendanaan pada substansi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Jabatan	Sub Koordinator Data dan Informasi
Tugas Pokok	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Penyusunan rencana kegiatan substansi Data dan Informasi pada substansi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan substansi Data dan Informasi pada substansi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan substansi Data dan Informasi pada substansi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah - Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas substansi Data dan Informasi pada substansi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Jabatan	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

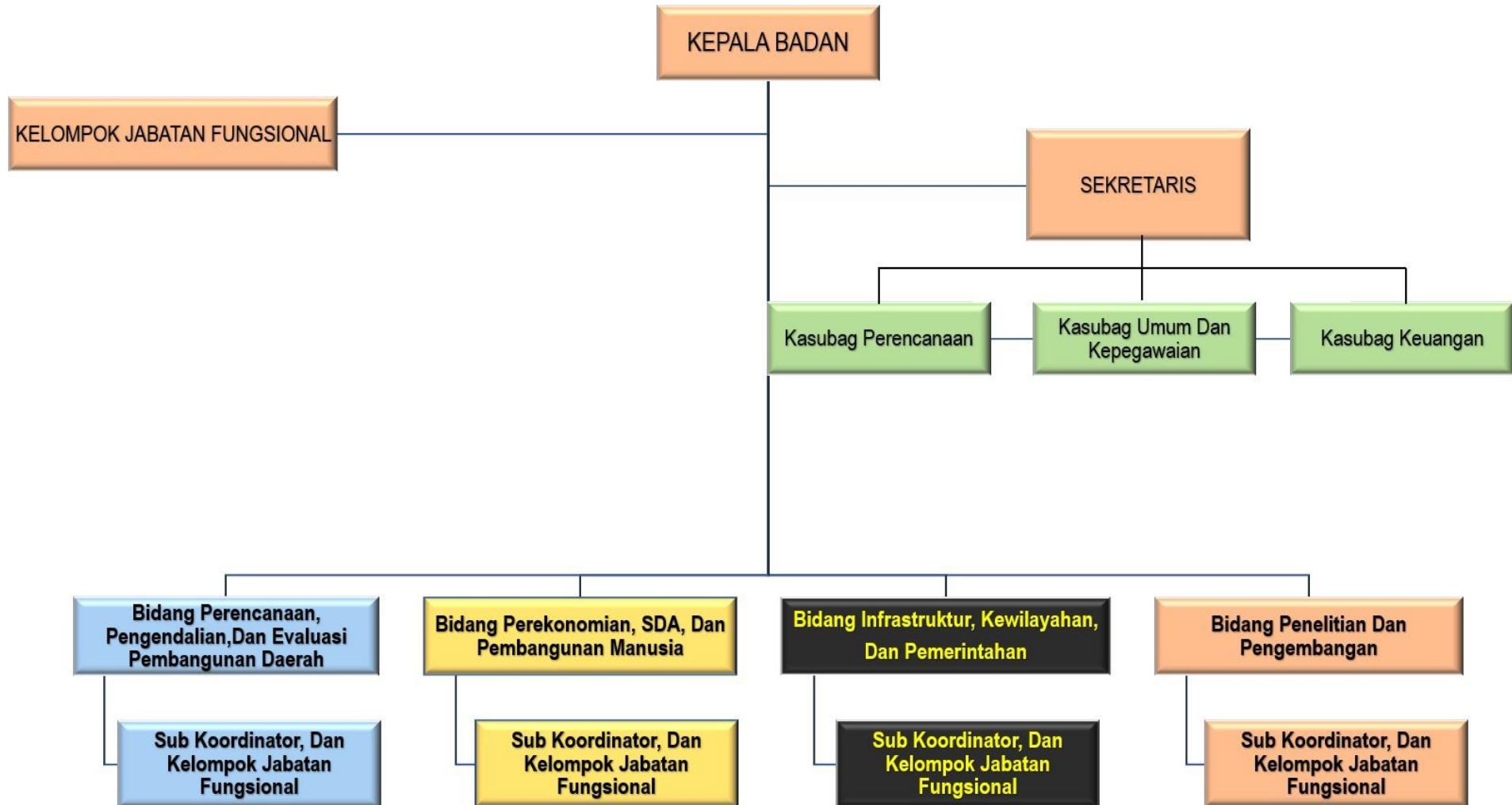
Tugas Pokok	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Penyusunan rencana kegiatan substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada substansi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada substansi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada substansi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada substansi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Jabatan	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Pembangunan Manusia
Tugas Pokok	Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, dan pembangunan manusia
Jabatan	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Perekonomian
Tugas Pokok	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Penyusunan rencana kegiatan substansi Perencanaan Bidang Perekonomian pada substansi sumber daya alam, dan pembangunan manusia - Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan substansi Perencanaan Bidang Perekonomian pada substansi sumber daya alam, dan pembangunan manusia - Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan substansi Perencanaan Bidang Perekonomian pada substansi sumber daya alam, dan pembangunan manusia - Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas substansi Perencanaan Bidang Perekonomian pada substansi sumber daya alam, dan pembangunan manusia
Jabatan	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Sumber Daya Alam
Tugas Pokok	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Penyusunan rencana kegiatan substansi Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam pada substansi sumber daya alam, dan pembangunan manusia - Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan substansi Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam pada substansi sumber daya alam, dan pembangunan manusia

	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan substansis Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam pada substansi sumber daya alam, dan pembahgunan manusia - Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas kegiatan substansis Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam pada substansi sumber daya alam, dan pembahgunan manusi
Jabatan	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
Tugas Pokok	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Penyusunan rencana kegiatan substansis Perencanaan Pembangunan Manusia pada substansi sumber daya alam, dan pembahgunan manusia - Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan substansis Perencanaan Pembangunan Manusia pada substansi sumber daya alam, dan pembahgunan manusia - Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan substansis Perencanaan Pembangunan Manusia pada substansi sumber daya alam, dan pembahgunan manusia - Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas kegiatan substansis Perencanaan Pembangunan Manusia pada substansi sumber daya alam, dan pembahgunan manusia
Jabatan	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, dan Pemerintahan
Tugas Pokok	Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan
Jabatan	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Infrastruktur
Tugas Pokok	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Penyusunan rencana kegiatan substansi Perencanaan Bidang Infrastruktur pada substansi infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan - Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan substansi Perencanaan Bidang Infrastruktur pada substansi infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan - Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan substansi Perencanaan Bidang Infrastruktur pada substansi infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan - Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan kegiatan substansi Perencanaan Bidang Infrastruktur pada substansi infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan

Jabatan	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Kewilayahan
Tugas Pokok	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Penyusunan rencana kegiatan substansi Perencanaan Bidang Kewilayahan pada substansi infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan - Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan substansi Perencanaan Bidang Kewilayahan pada substansi infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan - Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan substansi Koordinator Perencanaan Bidang Kewilayahan pada substansi infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan - Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas substansi Perencanaan Bidang Kewilayahan pada substansi infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan
Jabatan	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pemerintahan
Tugas Pokok	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Penyusunan rencana kegiatan substansi Perencanaan Bidang Pemerintahan pada substansi infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan - Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan substansi Perencanaan Bidang Pemerintahan pada substansi infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan - Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan substansi Perencanaan Bidang Pemerintahan pada substansi infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan - Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas kegiatan substansi Perencanaan Bidang Pemerintahan pada substansi infrastruktur kewilayahan dan pemerintahan
Jabatan	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tugas Pokok	Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang penelitian dan pembangunan daerah
Jabatan	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Sosial Pemerintahan
Tugas Pokok	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Penyusunan rencana kegiatan substansi Sosial dan Pemerintahan pada substansi penelitian dan pengembangan daerah - Melakukan Pengendalian dan Pemantauan substansi Sosial dan Pemerintahan pada substansi penelitian dan pengembangan daerah

	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan substansi Sosial dan Pemerintahan pada substansi penelitian dan pengembangan daerah - Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas substansi Sosial dan Pemerintahan pada substansi penelitian dan pengembangan daerah
Jabatan	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Ekonomi & Pembangunan
Tugas Pokok	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Penyusunan rencana kegiatan substansi Ekonomi dan Pembangunan pada substansi penelitian dan pengembangan daerah - Melakukan Pengendalian dan Pemantauan substansi Ekonomi dan Pembangunan pada substansi penelitian dan pengembangan daerah - Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan substansi Ekonomi dan Pembangunan pada substansi penelitian dan pengembangan daerah - Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas substansi Ekonomi dan Pembangunan pada substansi penelitian dan pengembangan daerah
Jabatan	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Inovasi & Teknologi
Tugas Pokok	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Penyusunan rencana kegiatan substansi Koordinator Inovasi dan Teknologi pada substansi penelitian dan pengembangan daerah - Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan substansi Koordinator Inovasi dan Teknologi pada substansi penelitian dan pengembangan daerah - Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan substansi Koordinator Inovasi dan Teknologi pada substansi penelitian dan pengembangan daerah - Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas substansi Koordinator Inovasi dan Teknologi pada substansi penelitian dan pengembangan daerah

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



2.2 SUMBER DAYA BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2.2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2022, jumlah pegawai adalah sebanyak 39 orang. Jumlah dan komposisi pegawai Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Jumlah dan Distribusi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH	STATUS	PENDIDIKAN
1.	Kepala Badan	1	ASN	S2 Adm Pembangunan
2.	Sekretaris	1	ASN	S2 Magister Adm Pem
	• Sub Bagian Perencanaan			
	▪ Kepala Sub Bagian	1	ASN	S1 Pemerintahan
	▪ Pelaksana/Staf	1	ASN	S2 Adm Kebijakan Publk
		1	Non ASN	
	• Sub Bagian Keuangan			
	▪ Kepala Sub Bagian	1	ASN	Magister Adm Keb Publik
	▪ Pelaksana/Staf	3	ASN	
		2	Non ASN	
	• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
	▪ Kepala Sub Bagian	1	ASN	S2. Magister Adm Pem Daerah
	▪ Pelaksana/Staf	2	ASN	
		4	Non ASN	
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	1	ASN	S2 Magister Adm Pem
	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Perencanaan, Pengend alian & Evaluasi Pembangunan Daerah	1	ASN	S1 Administrasi Negara
	▪ Pelaksana/Staf	6	ASN	
		4	Non ASN	
4.	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA dan Pembangunan Manusia	1		S2 Magister Adm Kebijakan Publik
NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH	STATUS	PENDIDIKAN
	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Perekonomian			S2 Magister Ekonomi Pembangunan
	Pelaksana	2	ASN	
		2	Non ASN	

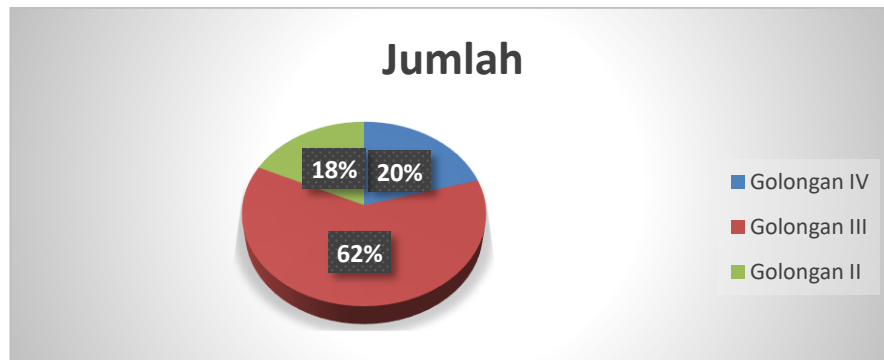
	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Sumber Daya Alam	1	ASN	S2 Magister Adm Pemb
	Pelaksana	2	ASN	
		2	Non ASN	
	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Infrastruktur	1	ASN	S1 Sosial
	Pelaksana	1	ASN	
		2	Non ASN	
5.	Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1	ASN	S2 Adm Pembangunan Daerah
	Fungsional Peneliti Ahli Muda Bidang Penelitian & Pengembangan Daerah	1	ASN	
	Pelaksana/Staf	1	ASN	
		1	Non ASN	
	Fungsional Peneliti Ahli Muda Bidang Penelitian & Pengembangan Daerah	1	ASN	S2 Magister Kependudukan dan Pengembangan SDM
	Pelaksana/Staf	2	ASN	
		1	Non ASN	
	Fungsional Peneliti Ahli Muda Bidang Penelitian & Pengembangan Daerah	1	ASN	S1 Pemerintahan
	Pelaksana/Staf	1	ASN	
		1	Non ASN	
6.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan Dan Pemerintahan	1	ASN	S2 Magister Sains
	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Infrastruktur	1	ASN	S1 Teknik Sipil
	▪ Pelaksana/Staf	2	ASN	
		1	Non ASN	
	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Kewilayahan		ASN	S1 Arsitektur
	▪ Pelaksana/Staf	2	ASN	
		1	Non ASN	
	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Infrastruktur Pemerintahan	1	ASN	S2 Magister Kebijakan Publik
	• Pelaksana/Staf	2	ASN	
		1	Non ASN	

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.2
ASN Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	8
2	Golongan III	24
3	Golongan II	7
Jumlah		39

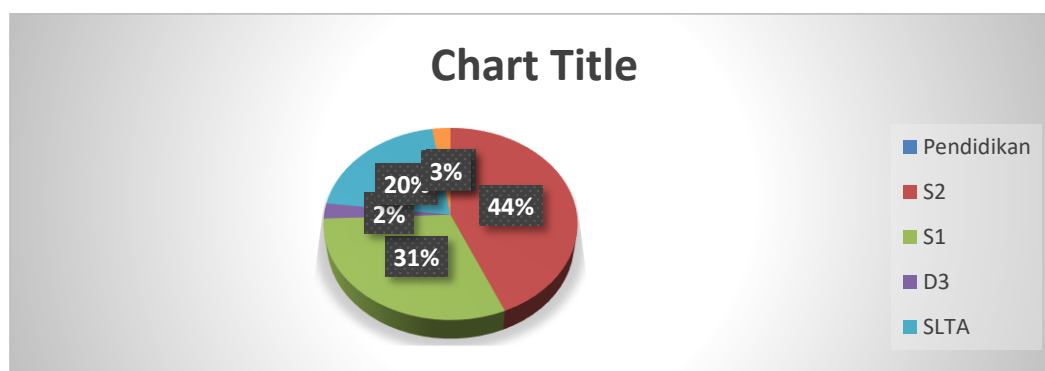
Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Tabel 2.3

ASN Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	17
2	S1	12
3	D3	1
4	SLTA	8
5	SLTP	1
Jumlah		39



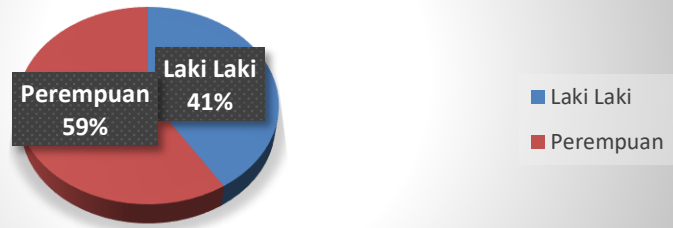
Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapeda Kabupaten Sidenreng Rappang 2018

Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah sudah cukup tinggi, namun jika ditinjau dari aspek komposisi pegawai pada saat ini khususnya dalam sudut pandang status dan penempatan pejabat/pegawai belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan.

ASN Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki Laki	16
2.	Perempuan	23
Jumlah		39

Jumlah



Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapeda Kabupaten Sidenreng Rappang

Jumlah ASN lingkup Bappelitbangda mayoritas/didominasi oleh perempuan sebanyak 23 orang (59%), dan laki laki sebanyak 16 orang (41%)

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kondisi saat ini masih menunjukkan belum terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi Rekapitulasi barang dan inventaris kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dilihat pada berikut.

**Tabel 2.4 Daftar Inventaris Barang Bapeda Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018**

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik/Rusak
Alat - alat Besar				
1	<i>Pompa</i>	1	√	
Alat alat Angkutan				
2	Sepeda Motor	13	√	√
Alat Kantor dan Rumah Tangga				
3	<i>Mesin Ketik</i>	1		√
4	<i>Mesin Hitung/Jumlah</i>	6	√	
5	<i>Alat Penyimpanan(Brankas)</i>	1	√	
Alat Rumah Tangga				
6	<i>Meubilair</i>	20	√	
7	<i>Alat Pembersih</i>	1	√	
8	<i>Alat Pendingin</i>	16	√	√
9	<i>Alat Dapur</i>	1	√	
Peralatan Komputer				
10	<i>Personal Komputer</i>	13	√	
11	<i>Laptop/Notebook</i>	17	√	
12	<i>Perlatan Jaringan</i>	1	√	
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat				
13	<i>Meja Kerja Pejabat</i>	21	√	
14	<i>Meja Rapat Pejabat</i>	1	√	
15	<i>Kursi Kerja Pejabat</i>	21	√	

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik/Rusak
16	<i>Kursi Rapat</i>	40	√	
17	<i>Lemari dan Arsip Pejabat</i>	14	√	
Alat Studio dan Alat Komunikasi				
18	<i>Peralatan Studio Visual (Camera)</i>	2	√	
19	<i>Peralatan Studio (Infocus)</i>	2	√	
20	<i>Drone</i>	1	√	
Alat Komunikasi				
21	<i>Alat Komunikasi Telephone</i>	7	√	

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kondisi sarana dan prasarana di Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Meskipun demikian, terdapat pula prasarana dan sarana yang kurang baik kondisi maupun jumlah. Seperti jumlah perangkat komputer yang tersedia saat ini sebanyak 36 unit dengan kondisi yang baik.

Melihat kondisi kantor Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang yang letaknya berada di Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang terhadap kebutuhan peningkatan kinerja aparatur Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini masih terlihat dari beberapa sarana penunjang yang belum memadai seperti kebutuhan sarana, *personal komputer* untuk pemetaan dan sistem informasi manajemen perencanaan dan pengendalian.

2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Secara garis besar sesuai tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang, kinerja pelayanan yang dicapai selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya Perubahan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026;
2. Terlaksananya penyusunan Rencana Tahunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, antara lain:
 - 1) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
 - 2) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - 3) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - 4) Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026
- 4). Tersusunnya Dokumen Dukungan Perencanaan Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 antara lain:
 - Tersusunnya Data dan Informasi Pembangunan;
 - Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan teknis Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Pemerintahan
 - Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan teknis Bidang Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pembangunan Manusia
 - Tersusunnya Dokumen Hasil Kelitbangan
- 5). Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024-2026 antara lain :
 - Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
 - Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang, pencapaian kinerja pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat ditunjukkan pada tabel berikut

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda

No	Indikator Permendagri	Target SPM	Target IKK	Target indikator kinerja	Target Renstra BAPPELITBANGDA					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA			100%	Ada					Ada						100%			
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA			100%	Ada					Ada						100%			
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA			100%	Ada					Ada						100%			
4	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA			100%	Ada					Ada						100%			
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		
7	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		
8	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		
9	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		

10	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
11	Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
12	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
13	Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
14	Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
15	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
16	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
17	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
18	Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	

19	Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Jangka Menengah Daerah Dan Tahunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	
20	Tingkat pemanfaatan hasil kajian yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	
21	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	
22	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBPD				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	
23	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan						75%	85%	100 %			75%	85%		100 %	100 %	100 %	100 %	

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Uraian	Anggaran					Realisasi					Rata Rata Pertumbuhan						
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	997,143,100	1,157,922,000	818,804,300			775,780,349	988,664,020	715,676,965			77.80	85.38	87.41			826,707,111	991,289,800
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,450,000	8,550,000	3,750,000			3,390,000	3,390,000	3,750,000			98.26	39.65	100.00			3,510,000	5,250,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	69,600,000	75,600,000	74,400,000			48,024,566	60,630,647	57,892,168			69.00	80.20	77.81			55,515,794	73,200,000
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	33,114,000	33,114,000	10,090,000			32,324,000	32,840,115	9,078,750			97.61	99.17	89.98			24,747,622	25,439,333
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	8,000,000	12,150,000	7,730,000			4,323,230	7,973,330	2,112,000			54.04	65.62	27.32			4,802,853	9,293,333
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	145,287,000	157,846,500	34,481,800			115,558,500	146,646,000	34,481,800			79.54	92.90	100.00			98,895,433	112,538,433
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	23,033,600	28,351,000	26,719,000			18,733,600	23,229,900	26,719,000			81.33	81.94	100.00			22,894,167	26,034,533
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	3,150,000	18,710,000	2,880,000			-	2,500,000	2,880,000			0.00	13.36	100.00			1,793,333	8,246,667
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	1,590,000	4,081,000	4,109,000			1,482,000	2,641,100	4,109,000			93.21	64.72	100.00			2,744,033	3,260,000

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang undangan	-		5,040,000			-		5,040,000			0.00	0.00	0.00			2,520,000	2,520,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	339,583,000	344,756,000	191,630,700			276,652,453	343,186,528	191,481,247			81.47	99.54	99.92			270,440,076	291,989,900
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	2,708,000	3,000,000	3,000,000			508,000	3,000,000	2,990,000			18.76	100.00	99.67			2,166,000	2,902,667
Pelayanan Administrasi Perkantoran	367,627,500	471,763,500	454,973,800			274,784,000	362,626,400	375,143,000			74.75	76.87	82.45			337,517,800	431,454,933
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	96,947,000	651,119,000	431,757,000			67,917,400	515,390,543	378,449,910			70.06	79.15	87.65			320,585,951	1,179,823,000
Pembangunan Gedung Kantor	4,071,000	4,071,000	4,071,000			-	-	-			0.00	0.00	0.00			-	4,071,000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	10,750,000	28,038,000			-	10,750,000	28,037,010			0.00	100.00	0.00			12,929,003	12,929,333
Pengadaan Peralatan gedung kantor	20,000,000	269,582,000	85,756,000			-	267,131,600	85,750,500			0.00	99.09	0.00			117,627,367	125,112,667
Pengadaan Meubeleu	-	13,350,000	79,195,000			-	4,880,000	76,642,093			0.00	36.55	0.00			27,174,031	30,848,333
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	72,876,000	132,473,000	100,210,000			67,917,400	58,374,943	64,180,307			93.20	44.07	64.05			63,490,883	101,853,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	220,893,000	122,917,000				174,254,000	118,710,000			0.00	78.89	0.00			146,482,000	114,603,333
Pemeliharaan rutin/berkala perlatan gedung kantor	-	-	11,570,000	-		-	-	5,130,000			0.00	0.00	0.00			1,710,000	2,892,500

Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bimbinah teknis implementasi peraturan perundang undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	30,928,100	18,235,300	22,838,600	-	-	13,290,500	20,844,000	-	-	0.00	72.88	91.27	11,378,167	24,000,667
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,990,100	18,235,300	17,237,600	-	-	13,290,500	16,870,000	-	-	0.00	72.88	97.87	15,080,250	15,821,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	18,938,000	-	5,601,000	-	-	-	3,974,000	-	-	0.00	0.00	70.95	3,974,000	12,269,500
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-

Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah	38,595,000	220,209,500	262,463,300	-	5,622,100	212,171,500	256,696,600	-	-	14.57	96.35	97.80	-	-	158,163,400	173,755,933
Penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan SDM	23,036,000		77,557,500			-	74,556,300	-		0.00	0.00	96.13			24,852,100	50,296,750
Penelitian dan pengembangan bidang sosial kependudukan,ekonomi dan pembangunan	15,559,000	220,209,500	184,905,800		5,622,100	212,171,500	182,140,300			36.13	96.35	98.50			133,311,300	140,224,767
Program Pengembangan data dan Informasi	16,861,000	-	16,861,000		6,042,500	-	6,042,500	-	-	35.84	0.00	35.84			3,021,250	11,240,667
Pengumpulan Updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	16,861,000		16,861,000		6,042,500		6,042,500			35.84	0.00	35.84			6,042,500	16,861,000
Penyusunan & analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00			-	-
Penyusunan Profil Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00			-	-
Pengintegrasian sistim informasi pembangunan daerah (SDDKN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00			-	-
Program Kerjasama Pembangunan	11,481,000	10,983,000	11,481,000	-	498,000	10,866,000	498,000	-		4.34	98.935	4.34			2,965,500	11,315,000

Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah	11,481,000	10,983,000	11,481,000			498,000	4,749,000	498,000			4.34	43.24	4.34			1,915,000	11,315,000
Penyusunan Dokumen SDGS		35,684,000	18,057,000				6,117,000	15,357,000			0.00	17.14	0.00				
Program Lingkungan Sehat Perumahan	10,792,300	-	10,792,300			10,792,300	-	10,792,300	-		100.00	0	100.00			5,396,150	7,194,867
Penyediaan air bersih & sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	10,792,300		10,792,300			10,792,300		10,792,300			100.00	0.00	100.00			10,792,300	10,792,300
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	-	-			-	-	-	-		0	0	0			-	-
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang	-	-	-			-	-	-	-		0.00	0.00	0.00			-	-
Program Pengembangan Sistim Inovasi Daerah (SIDA)	89,609,000	44,239,700	237,353,900			310,344,628	22,367,000	-			346.33	50.56	0.00			110,903,876	123,734,200
Pengembangan Sistim Inovasi Daerah	57,548,000	44,239,700	-			310,344,628	22,367,000	-			539.28	50.56	#DIV/0!			110,903,876	33,929,233
Peningkatan Kapasitas Data Risert & Teknologi	32,061,000	-	237,353,900			-					0.00	0.00	0.00			#DIV/0!	89,804,967

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	375,343,000	292,384,500	174,672,900		54,432,500	-	-	291,794,712			0	0.00	0			97,264,904	280,800,133
Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW	3,100,000	237,952,000	44,338,500			-		237,623,941			0.00	0.00	0.00			118,811,971	95,130,167
Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD	372,243,000	54,432,500	130,334,400		54,432,500	-		54,170,771			0.00	0.00	0.00			27,085,386	185,669,967
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	114,034,500	167,358,500	132,842,500			74,053,300	54,454,500	84,515,000			64.94	32.54	63.62			71,007,600	138,078,500
Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		105,177,500	427,800,000					95,707,600									
Operasional Penunjang Kegiatan Fisik dan Prasarana	81,257,500		81,257,500			51,949,500		51,949,500			63.93	0.00	63.93			51,949,500	81,257,500
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	32,777,000	38,351,000	51,585,000			22,103,800	32,565,500	32,565,500			67.44	84.91	63.13			29,078,267	40,904,333
Operasional Pamsimas		23,830,000	8,663,500				21,889,000	21,889,000				91.85				21,889,000	16,246,750
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah												0					

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	670,792,000	1,169,600,000	887,847,000	-	485,714,588	1,434,130,532	596,965,070	-	-	72.41	122.62	67.24	838,936,730	909,413,000
Penyusunan Rancangan RPJMD	287,263,000	-	287,263,000	-	192,385,250	-	192,385,250	-	-	0.00	0.00	0.00	192,385,250	287,263,000
Penetapan RPJMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	135,524,000	125,148,000	97,335,000	-	134,070,901	-	108,172,100	-	-	98.93	0.00	111.13	121,121,501	119,335,667
Penetapan (Revisi) RPJPD	-	-	-	-	-	108,172,100	-	-	-	0.00	0.00	0.00	36,057,367	-
Penetapan RKPD	83,977,500	119,793,000	342,562,000	-	67,544,650	117,487,600	117,487,600	-	-	80.43	98.08	34.30	100,839,950	182,110,833
Monitoring Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	32,508,500	71,963,500	36,787,000	-	14,558,500	50,434,900	50,434,900	-	-	44.78	70.08	137.10	38,476,100	47,086,333
Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
Revisi RPJMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	14,880,000	23,760,000	14,880,000	-	9,482,500	11,284,500	9,482,500	-	-	63.73	47.49	63.73	10,083,167	17,840,000

Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	48,415,000	643,134,500	48,415,000			46,199,958	586,022,730	46,199,958			95.42	91.12	95.42			226,140,882	246,654,833
Koordinasi Penyusunan Data DAK, APBD, LAPBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi	68,224,000	81,544,000	60,605,000			21,472,829	72,802,762	72,802,762			31.47	89.28	120.13			55,692,784	70,124,333
Pelaksanaan Asistensi RKA/RKAP	-	104,257,000	-			-	61,950,340	-			0.00	59.42	0.00			20,650,113	34,752,333
Penyusunan RPJMD		529,176,000					425,975,600										
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	39,674,500	743,411,500	222,061,000			31,321,751	670,708,801	670,708,801			78.95	90.22	302.04			457,579,784	335,049,000
Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi	10,117,500	66,397,500	45,300,000			6,893,750	45,928,000	45,928,000			68.14	69.17	101.39			32,916,583	40,605,000
Operasional Penelitian & Pengembangan	-		-			-		-			#DIV/0!	0.00	#DIV/0!			-	-
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	29,557,000	677,014,000	176,761,000			24,428,001	624,780,801	624,780,801			82.65	92.28	353.46			424,663,201	294,444,000
Program Perencanaan Sosial Budaya	40,664,500	101,695,000	44,656,000			24,524,000	108,863,002	73,257,300			60.31	107.05	164.05			68,881,434	62,338,500
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	-	-	-			-	-	-			0.00	0.00	0.00			-	-
Monitoring dan evaluasi kesehatan gratis	-	-	-			-	-	-			0.00	0.00	0.00			-	-

Monitoring dan evaluasi pendidikan gratis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	27,432,500	58,974,000	34,742,000			20,638,000	45,976,300	45,976,300		75.23	77.96	132.34		37,530,200	40,382,833
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	13,232,000	42,721,000	9,914,000			3,886,000	27,281,000	27,281,000		29.37	63.86	275.18		19,482,667	21,955,667
Koordinasi dan Monev Kawasan Perdesaan Priritas Nasional (KPPN)		49,446,000	14,420,000				35,605,702	35,605,702							
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	224,675,000	263,850,000	305,265,000			142,591,274	234,144,800	234,144,800		63.47	88.74	76.70		203,626,958	264,596,667
Operasional Pendamping WISMP/IPDMIP	224,675,000	263,850,000	305,265,000			142,591,274	234,144,800	234,144,800		63.47	88.74	76.70		203,626,958	264,596,667
Program Perencanaan Tata Ruang	520,203,000	126,360,000	520,203,000		126,360,000	498,915,500	117,333,000	498,915,500		95.91	92.86	95.91		371,721,333	388,922,000
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah	520,203,000	126,360,000	520,203,000			498,915,500	117,333,000	498,915,500		95.91	92.86	95.91		371,721,333	388,922,000
Program Prima Kesehatan	32,067,000	-	32,067,000		-	27,396,000	-	27,396,000	-	85.43	0.00	85.43		13,698,000	21,378,000
Peningkatan kesehatan Masyarakat desa & kelurahan	32,067,000		32,067,000			27,396,000		27,396,000		85.43	0.00	85.43		27,396,000	32,067,000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,406,463,200	4,919,244,600				5,176,372,122	4,456,902,868				95.74	90.60	4,850,839,863	5,162,853,900
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22,062,200	23,788,200				21,104,000	22,840,200				95.66	96.01	22,577,467	22,925,200
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3,347,000	17,706,000				3,307,000	16,798,000				98.80	94.87	12,603,667	10,526,500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD				2,477,000					2,475,000					99.92		2,475,000	2,477,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD				1,833,600					1,832,000					99.91		1,832,000	1,833,600
Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD				4,955,000					4,529,000					91.40		4,529,000	4,955,000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD				4,625,600					4,218,000					91.19		4,218,000	4,625,600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2,629,000	3,549,700				2,568,000	3,538,200				97.68	99.68	3,218,633	3,089,350
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2,195,000	2,532,500				2,175,000	2,504,000				99.09	98.87	2,403,833	2,363,750

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,176,353,000	4,043,492,900				4,021,496,907	3,714,338,296				96.29	91.86	3,926,442,701	4,109,922,950
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4,141,607,000	4,010,413,000				3,989,985,707	3,681,973,396				96.34	91.81	3,894,124,034	4,076,010,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25,452,000	23,700,100				22,217,200	23,410,100				87.29	98.78	23,109,133	24,576,050
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				9,294,000	9,379,800				9,294,000	8,954,800				100.00	95.47	9,209,533	9,336,900
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5,670,000	5,726,400				5,670,000	5,326,400				100.00	93.01	5,574,267	5,698,200
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5,670,000	5,726,400				5,670,000	5,326,400				100.00	93.01	5,574,267	5,698,200
Administrasi Umum Perangkat Daerah				353,726,000	353,635,200				349,257,925	334,076,696				98.74	94.47	345,656,607	353,680,600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4,171,000	4,167,400				4,110,000	4,117,400				98.54	98.80	4,131,600	4,169,200
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7,364,000	7,274,800				7,129,000	7,074,000				96.81	97.24	7,159,267	7,319,400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16,154,000					15,888,000					98.35	#DIV/0!	15,888,000	16,154,000

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				19,734,000	18,516,000				18,312,000	17,982,500				92.79	97.12	18,270,167	19,125,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5,400,000	5,400,000				5,400,000	5,400,000				100.00	100.00	5,400,000	5,400,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				282,903,000	282,277,000				280,418,925	263,502,796				99.12	93.35	275,399,574	282,590,000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				18,000,000	36,000,000				18,000,000	36,000,000				100.00	100.00	30,000,000	27,000,000
Penyediaan Bahan/Material														0.00	0.00	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				321,637,000	60,938,200				303,203,040	59,200,000				94.27	97.15	141,113,747	191,287,600
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				321,637,000	60,938,200				303,203,040	59,200,000				94.27	97.15	141,113,747	191,287,600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				284,173,000	305,696,400				260,888,851	255,948,415				91.81	83.73	274,177,889	294,934,700
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4,200,000	4,140,000				3,440,000	2,880,000				81.90	69.57	3,486,667	4,170,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				62,968,000	62,748,000				50,503,851	54,846,515				80.21	87.41	56,032,789	62,858,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				217,005,000	238,808,400				206,945,000	198,221,900				95.36	83.00	214,658,433	227,906,700
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				242,842,000	125,967,300				214,751,399	65,172,861				88.43	51.74	135,297,187	184,404,650
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				80,272,000	96,922,000				59,851,399	45,246,061				74.56	46.68	67,339,820	88,597,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150,000,000	20,974,300				148,780,000	18,176,800				99.19	86.66	62,643,700	85,487,150
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12,570,000	8,071,000				6,120,000	1,750,000				48.69	21.68	5,313,667	10,320,500

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				911,156,800	1,056,673,200				826,959,175	894,710,514				90.76	84.67	926,114,296	983,915,000
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				727,294,800	877,626,500				702,423,875	767,385,673				96.58	87.44	782,478,683	802,460,650
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				28,335,000	2,018,000				28,314,000	2,018,000				99.93	100.00	10,783,333	15,176,500
Pelaksanaan Konsultasi Publik				29,438,000	50,010,400				28,462,000	45,868,400				96.68	91.72	41,446,933	39,724,200
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD				15,723,500	14,836,500				14,952,000	14,735,500				95.09	99.32	14,841,333	15,280,000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				98,323,000	97,679,000				95,325,500	95,378,497				96.95	97.64	96,127,666	98,001,000
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan				16,775,000	22,477,600				16,657,500	22,465,600				99.30	99.95	20,533,567	19,626,300
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				538,700,300	690,605,000				518,712,875	586,919,676				96.29	84.99	598,745,850	614,652,650

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				88,450,000	125,709,200				68,735,000	99,904,591				77.71	79.47	98,116,264	107,079,600
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				88,450,000	125,709,200				68,735,000	99,904,591				77.71	79.47	98,116,264	107,079,600
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				95,412,000	53,337,500				55,800,300	27,420,250				58.48	51.41	45,519,350	74,374,750
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				95,412,000	53,337,500				55,800,300	27,420,250				58.48	51.41	45,519,350	74,374,750
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				932,571,500	690,612,300				789,682,592	580,510,959				84.68	84.06	686,935,284	811,591,900
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				156,165,000	211,354,200				131,499,501	182,913,459				84.21	86.54	175,255,720	183,759,600

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5,088,000	1,735,100				2,312,000	822,600			45.44	47.41	1,623,233	3,411,550
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				9,075,000	2,286,400				9,075,000	1,566,400			100.00	68.51	4,309,267	5,680,700
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				3,938,000	7,254,900				3,846,000	6,714,900			97.66	92.56	5,938,600	5,596,450
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				26,120,000	29,835,800				25,042,000	12,695,800			95.87	42.55	22,524,533	27,977,900

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				7,894,000	79,060,000				4,564,000	74,166,967			57.82	93.81	52,596,989	43,477,000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				10,868,000					7,538,000				69.36	#DIV/0!	7,538,000	10,868,000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				26,926,000					21,776,000				80.87	#DIV/0!	21,776,000	26,926,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				66,256,000	91,182,000				57,346,501	86,946,792			86.55	95.36	78,491,764	78,719,000

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				206,246,600	113,998,000				142,523,691	103,747,200				69.10	91.01	120,089,630	160,122,300
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				7,548,000	22,154,000				4,588,000	18,916,400				60.78	85.39	15,219,467	14,851,000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				5,501,000					4,761,000					86.55		4,761,000	5,501,000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				23,215,000					14,057,240					60.55		14,057,240	23,215,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				103,892,800	40,800,000				54,886,651	39,308,719				52.83	96.34	44,998,457	72,346,400

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5,825,800	16,544,000				3,457,800	11,212,000				59.35	67.77	10,404,600	11,184,900
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				5,148,000					4,778,000					92.81		4,778,000	5,148,000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				9,469,000					5,057,000					53.41		5,057,000	9,469,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				45,647,000	34,500,000				50,938,000	34,310,081				111.59	99.45	39,916,027	40,073,500
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				570,159,900	365,260,100				515,659,400	293,850,300				90.44	80.45	391,589,933	467,710,000

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				12,382,000	2,656,900				11,322,000	2,656,900				91.44	100.00	5,545,267	7,519,450
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				5,005,000	1,948,900				4,505,000	1,948,900				90.01	100.00	2,800,933	3,476,950
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				9,078,000	26,182,200				10,605,000	17,191,200				116.82	65.66	17,992,800	17,630,100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				89,143,900	103,529,200				70,102,400	93,101,700				78.64	89.93	88,911,100	96,336,550
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				10,930,000	2,480,200				12,940,000	2,478,900				118.39	99.95	5,966,367	6,705,100

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				7,040,000	2,522,900				7,040,000	1,622,900				100.00	64.33	3,728,600	4,781,450
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				322,468,500	6,387,400				302,543,200	3,267,400				93.82	51.15	104,066,000	164,427,950
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				114,112,500	219,552,400				96,601,800	171,582,400				84.65	78.15	162,578,867	166,832,450
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				581,501,200	364,177,400				558,205,830	298,337,173				95.99	81.92	406,906,801	472,839,300
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				201,047,000	230,879,600				181,972,000	202,938,337				90.51	87.90	205,263,312	215,963,300

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				121,329,000	100,870,000				107,092,000	99,390,000				88.27	98.53	102,450,667	111,099,500
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa				79,718,000					74,880,000					93.93		74,880,000	79,718,000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum					46,284,000					40,282,737				0.00	87.03	43,283,369	46,284,000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan					43,839,700					33,711,000				0.00	76.90	38,775,350	43,839,700
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan Dan Asset Daerah, Reformasi Birokrasi					15,379,600					15,042,600				0.00	97.81	15,211,100	15,379,600

Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data Dan Pengkajian Peraturan					24,506,300					14,512,000				0.00	59.22	19,509,150	24,506,300
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				244,862,200	80,723,800				242,736,798	65,746,836				99.13	81.45	129,735,811	162,793,000
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				108,832,200					107,604,800					98.87	0.00	107,604,800	108,832,200
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja				136,030,000					135,131,998					99.34	0.00	135,131,998	136,030,000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial					34,223,800					26,804,836				#DIV/0!	78.32	30,514,318	34,223,800
Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					46,500,000					38,942,000				0.00	83.75	42,721,000	46,500,000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi & Pembangunan				110,216,000										0.00			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah														0.00			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				110,216,000	-				110,035,032	-				99.84		36,678,344	55,108,000

Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				110,216,000					110,035,032					99.84	0.00	110,035,032	110,216,000
Pengembangan Inovasi dan Teknologi				25,376,000	52,574,000				23,462,000	29,652,000				92.46	56.40	35,229,333	38,975,000
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif					52,574,000					29,652,000				0.00	56.40	41,113,000	52,574,000
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				25,376,000					23,462,000					92.46	0.00	23,462,000	25,376,000
Jumlah	3,309,810,000	4,967,368,000	4,131,965,800	7,831,692,700	7,030,707,500	1,962,598,190	4,265,051,198	3,367,781,958	7,351,219,719	6,230,461,514	59.30	85.86	81.51	93.87	88.62	4,236,662,766	5,060,209,125

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Tahun					Rasio Antara Reaisasi & Anggaran				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	8	0	10	0	10	13	14	15	14	15	18	19	20	19	20
	Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran																		
	Jumlah dokumen bermaterai				1,500	625	1,500			1,055	607	1,055			70.33	97.12	70.33		
	Waktu penyediaan jasa komunikasi sda & listrik				12	12	12			12	12	12			100.00	100.00	100.00		
	Penyediaan jaminan barang milik daerah (Asuransi)				12	12	12			12	12	12			100.00	100.00	100.00		
	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan				21	15	21			21	13	21			100.00	86.67	100.00		
	Waktu Penyediaan administrasi jasa adm keuangan				12	12	12			12	12	12			100.00	100.00	100.00		
	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor				12	12	12			12	12	12			100.00	100.00	100.00		
	Jumlah dan jenis Peralatan Kerja diperbaiki				36	48	36			31	-	31			86.11	0.00	86.11		
	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				60	93	60			55	92	55			91.67	98.92	91.67		
	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				70	93	70			53	92	53			75.71	98.92	75.71		
	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah				20	30	20			5	29	5			25.00	96.67	25.00		
	Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran				100	12	100			100	12	100			100.00	100.00	100.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
	Jumlah gedung kantor yang dibangun				1	1	1			1	1	1			100.00	0.00	100.00		
	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan					4				2	4	2			0.00	0.00	0.00		
	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan				1	9	1				9				0.00	0.00	0.00		
	Jumlah dan jenis mebeleur kantor yang diadakan					70					70				0.00	0.00	0.00		
	Jumlah dan jenis gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala				1	1	1				1				0.00	100.00	0.00		

	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala				21	15	21	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlatan gedung kantor					20		
	Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur							
	Uapaya Peningkatan Kompetensi sumber daya aparatur							
	Terlaksananya Bimtek,kursus,diklat oeningkatan Kompetensi sumber daya aparatur							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan							
	Dokumen LKJIP,Renstra,Renja,RKA dan DPA SKPD				6	6	6	
	Jumlah laporan keuangan semesteran				2	2	2	
	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran							
	Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah							
	Terlaksananya penelitian & penembangan bidang pemerintahan & SDM					4		
	Terlaksananya penelitian & penembangan bidang Sosial,Kependudukan,Ekonomi dan Pembangunan				4	4	4	
	Program Pengembangan data dan Informasi							
	Pengumpulan Updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan					100		
	Penyusunan & analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi					100		
	Tersusunnya Profil Daerah							
	Pengintegrasian sistim informasi pembangunan daerah (SDDKN)					100		
	Program Kerjasama Pembangunan							

						12		
						14		
						6	6	6
						2	2	2
							4	
						4	4	4
							100	

		0.00	80.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
		-	-	-		
		0.00	0.00	0.00		
		100.00	100.00	100.00		
		100.00	100.00	100.00		
		0.00	0.00	0.00		
			100.00			
		0.00	0.00	0.00		
			100.00			
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		

	Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah				1	4	1	
	Program Lingkungan Sehat Perumahan							
	Penyediaan air bersih & sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin					22		
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				-	-	-	
	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang				-	-	-	
	Program Pengembangan Sistim Inovasi Daerah (SIDA)							
	Pengembangan Sistim Inovasi Daerah				8	8	8	
	Peningkatan Kapasitas Data Risert & Teknologi				1	4	1	
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh							
	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW				1	1	1	
	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD				1	1	1	
	Terwujudnya Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar							
	Koordinasi Perencanaan Pusat-Pusat Pendidikan							
	Koordinasi Infrastruktur & Pengembangan Wilayah				3	3	3	
	Operasional Penunjang Kegiatan Fisik dan Prasarana					100		
	Operasional Pamsimas				4	1	4	
	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)				2	1	2	
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah							
	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana					7		

					1		1	
					3	20	3	
					-	-	-	
					-	-	-	
					8	-	8	
					1	4	1	
					1	1	1	
					1	1	1	
					-		-	
					3	3	3	
					100	100	100	
					4	1	4	
					2	1	2	
					-	7	-	

		100.00	0.00	100.00		
			90.91			
		0.00	0.00	0.00		
		100.00	0.00	100.00		
		100.00	100.00	100.00		
		100.00	0.00	100.00		
		0.00	0.00	0.00		
		100.00	0.00	100.00		
		100.00	100.00	100.00		
		0.00	100.00	0.00		

	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							
	Terlaksananya musrenbang desa/kel,kec ,forum SKPD, Kab,				4	7	4	
	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RAPBD dan APBD)				4	3	4	
	Dokumen Ranangan RPJMD				1	1	1	
	Terlaksananya Monev				4	6	4	
	tersusunnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah				2	6	2	
	Tersedianya dokumen KUA-PPAS Perubahan dan KUA-PPAS pokok				2	2	2	
	Tersedianya Laporan Monev Program DAK,APBD I,APBN/PHLN,TP dan Dekonsentrasi				4	4	4	
	Revisi RPJMD					1		
	Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)				2	2	2	
	Pengembangan Sistim Infrmasi Perencanaan Pembangunan Daerah				1	1	1	
	Koordinasi Penyusunan Data DAK,APBD I,APBN/PHLN,TP dan Dekonsentrasi				4	6	4	
	Pelaksanaan Asistensi RKA/RKAP				2	2	2	
	Tingkat kinerja Perencanaan pembangunan ekonomi							
	Terwujudnya sinkronisasi program kegiatan bidang ekonomi				4	10	4	
	Tersedianya laporan TPKD				2	2	2	
	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan Operasional Penelitian & Pengembangan							
	Program Perencanaan Sosial Budaya							

4	7	4	
4	4	4	
4	4	4	
	-		
2	2	2	
4	4	4	
	1		
2	2	2	
1	1	1	
4	6	4	
2	2	2	
4	4	4	
2	2	2	

100.00	0.00	100.00		
0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00		
100.00	66.67	100.00		
0.00	0.00	0.00		
100.00	100.00	100.00		
100.00	100.00	100.00		
0.00	100.00	0.00		
100.00	100.00	100.00		
100.00	100.00	100.00		
100.00	100.00	100.00		
100.00	40.00	100.00		
100.00	100.00	100.00		
0.00	0.00	0.00		

	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya					10					10				0.00	0.00	0.00			
	Monitoring dan evaluasi kesehatan gratis					4	4	4			4	4	4		100.00	100.00	100.00			
	Monitoring dan evaluasi pendidikan gratis					4	4	4			4	4	4		100.00	100.00	100.00			
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial					4	4	4			4	4	4		100.00	100.00	100.00			
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya					4	10	4			4	4	4		100.00	40.00	100.00			
	Terwujudnya kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif yang mandiri																			
	Terlaksananya penguatan kelembagaan pengelola irigasi partisipatif					100	100	100			100	100	100		100.00	100.00	100.00			
	Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah																			
	Tersedianya Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah					1	1	1			1	-	1		100.00	0.00	100.00			
	Cakupan derajat Kesehatan masyarakat meningkat																			
	Peningkatan kesehatan Masyarakat desa & kelurahan					12	12	12			12	12	12		100.00	100.00	100.00			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							4	8				4	8					100.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD							1					1						100.00	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD							1					1						100.00	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD							1					1						100.00	0.00

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD							1										100.00	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							5	5					5	5			100.00	100.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							4	4					4	4			100.00	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							100	100					100	100			100.00	100.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							12	12					12	12			100.00	100.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							12	12					12	12			100.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							18	18					18	18			100.00	100.00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							12	12					12	12			100.00	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							80	80					75	71			93.75	88.75
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							23	23					23	19			100.00	82.61
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							12						12				100.00	0.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							12	12					12	12			100.00	100.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							5	5					5	5			100.00	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							130	130					128	125			98.46	96.15
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							12	12					12	12			100.00	100.00

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							26	7					22	7				84.62	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							700	700					649	614				92.71	87.71
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							12	12					12	12				100.00	100.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							12	12					12	12				100.00	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							18	18					17	17				94.44	94.44
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							1	1					1	1				100.00	100.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							30	30					27	29				90.00	96.67
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																			
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan																			
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah							2	2					2	2				100.00	100.00
	Pelaksanaan Konsultasi Publik							6	6					6	6				100.00	100.00
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD							2795	2795					2795	2795				100.00	100.00
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota							1400	1400					1400	1400				100.00	100.00

	Penelitian dan Pengembangan Bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah																		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan																		
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							1						1				0.00	100.00
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi																		
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif								1						1				100.00
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan							1						1				100.00	0.00

Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
-1	-4	-5	-6	-5	-6	-9	-10	-11	-10	-11	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
BELANJA DAERAH	7,455,228,000.00	9,256,782,000.00	8,123,782,300.00	7,831,692,700.00	7,030,707,500.00	6,630,413,775.00	8,400,060,494	7,710,074,857	7,351,183,719	6,323,510,034	80.93	88.94	94.91	93.86	89.94	7,030,707,499	6,323,510,033
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,827,175,000.00	3,685,153,000.00	3,989,635,000.00			3,749,259,484	3,749,259,484	3,945,316,380			93.81	97.96	98.89	-	-	0	0
- Belanja pegawai	3,827,175,000	3,685,153,000	3,989,635,000			3,717,795,419	3,749,259,484	3,633,173,984			93.81	97.96	91.07	-	-	0	0
BELANJA LANGSUNG	3,603,982,000	5,571,629,000	4,134,149,000			2,881,154,291	4,766,886,510	3,755,758,477			65.8	79.41	90.85	-		0	0
- Belanja Pegawai	245,830,000	495,706,000	20,150,000	4,141,607,000	4,010,413,000	184,148,000	359,495,500	12,700,000	3,989,985,707	3,763,381,916	0	74.91	63	96.34	93.84	4,010,412,999	3,763,381,915
- Belanja barang dan jasa	3,358,152,000	4,778,170,000	3,906,010,000	3,337,957,700	2,900,606,300	2,697,006,291	4,124,629,410	3,537,628,874	3,030,466,722	2,443,828,120	71.65	80.31	90.57	90.79	84.25	2,900,606,299	2,443,828,119
- Belanja Modal	0	297,753,000	207,989,000	352,128,000	119,688,200		282,761,600	205,429,603	330,429,603	116,300,000	0	0	98.77	93.84	97.17	0	116,299,999

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda yang menjadi kelompok sasaran layanan adalah seluruh perangkat daerah dan stakeholder dalam proses penyusunan dokumen perencanaan sebagai bentuk control dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh [erangkat daerah sudah sesuai dengan mekanisme dan sistematika yang diatur dengan undang undang beserta turunannya.

Kegiatan yang lain yang dilakukan adalah bekerjasama dengan pihak lain dengan melakukan survei terhadap kepuasan masyarakat terkait pelayanan public dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan yang berkaitan dengan pelayanan public, hal lain yang dilakukan adalah melakukan pendampingan bagi perangkat daerah untuk melakukan inovasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPELITBANGDA KAB. SIDRAP

Selama periode 2014-2018, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Kemudian terkait dengan munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanganan bencana alam, penanggulangan kemiskinan,. Berkaitan dengan isu- isu tersebut, maka Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dituntut untuk antisipatif dan proaktif sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah tetap terjamin.

Dalam pelaksanaan peran Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai penyusun strategi,dan urusan perencanaan (*think tank*), optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Peningkatan kualitas hasil analisa/telaahan/kajian sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan ragam, kualitas dan pemanfaatan data/informasi yang optimal. Selain itu, dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan semakin mendekatnya antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan pembangunan. Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, permasalahan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Aspek	Permasalahan
Permasalahan dalam Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan data akurat yang kurang memadai 2. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal 3. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan antar perangkat daerah 4. Hasil evaluasi belum dijadikan rujukan utama dalam perencanaan selanjutnya 5. Kualitas para perencana di Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota masih belum memadai
Permasalahan dalam Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya data sektoral yang menjadi penunjang perencanaan 2. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal 3. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan antar perangkat daerah 4. Hasil evaluasi dan data/informasi yang tersedia belum dijadikan rujukan utama dalam perencanaan selanjutnya 5. Kualitas perencana yang masih kurang memadai
Permasalahan dalam Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya data sektoral yang menjadi penunjang perencanaan 2. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal 3. Kualitas perencana yang masih kurang memadai 4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan antar perangkat daerah 5. Hasil evaluasi dan data/informasi yang tersedia belum dijadikan rujukan utama dalam perencanaan selanjutnya 6. Belum konsistennya antara rencana kerja dengan alur kas sehingga realisasi fisik dan keuangan tidak sinkron 7. Data BPS untuk tahun berkenaan terbitnya tidak bersamaan dengan dokumen perencanaan
Permasalahan dalam Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya data sektoral yang menjadi penunjang perencanaan 2. Terdapat tumpang tindih fungsi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; 3. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan antar perangkat daerah

<p>Permasalahan dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penelitian belum sepenuhnya dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan program pembangunan d 2. Hasil kajian belum menjadi acuan dalam perumusan perencanaan/kebijakan pembangunan daerah. 3. SDM peneliti (laki-laki dan perempuan) yang tersedia belum sepenuhnya mendukung kebutuhan kajian yang dibutuhkan.
--	--

Berdasarkan analisis dan lesson learned yang diperoleh dari perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Sulawesi Selatan, serta dinamika peraturan perundang-undangan dan dinamika pembangunan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam proses perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah yang dihadapi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang, yang antara lain

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketersediaan Data Belum Akurat	Ketersediaan data akurat belum memadai	- Lemahnya manajemen data - Perbedaan sumber data dan informasi
2.	Monitoring dan evaluasi yang belum optimal	Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah belum optimal	- Dokumen perencanaan dan penganggaran belum konsisten - Ketersediaan analisa capaian kinerja belum optimal
3.	Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah belum optimal	Belum optimalnya proses koordinasi dan sinkronisasi	Perencanaan anggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian kebutuhan
4	Belum optimalnya pemanfaatan hasil hasil kelitbangan untuik digunakan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Pelaksanaan kegiatan kelitbangan belum sepenuhnya diarahkan untuk menjawab permasalahan pembangunan	- Penelitian dan pengembangan yang sudah dilakukan belum sepenuhnya di manfaatkan hasilnya oleh perangkat daerah dan pemangku kepentingan - SDM dan fasilitas pendukung belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas

3.2 Penentuan Isu isu Strategis Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang

Analisis isu isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan perangkat daerah dalam melengkapi tahapan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya . Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan yang dihadapi dalam pembangunan. Isu isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang.

Sebuah kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang jika tidak diantisipasi akan menimbulkan dampak kerugian yang besar atau sebaliknya, dalam hal jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dalam hal ini isu isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Kapasitas,kualitas,kuantitas dan pemerataan SDM perencana
2. Keselarasan dokumen perencanaan OPD dan dokumen perencanaan lainnya
3. Ketepatan waktu tersedianya dokumen perencanaan OPD dan dokumen perencanaan lainnya
4. Keterserapan usulan masyarakat melalui musrenbang
5. Ketersediaan,validitas,pemanfaatan, pengelolaan, pengintegrasian perencanaan dan penganggaran berbasis Teknologi Informasi (IT)
6. Terbatasnya sumberdaya yang berkompeten dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
7. Pemanfaatan hasil kajian/penelitian
8. Pengembangan inovasi daerah

9. Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi program,kegiatan dan sub kegiatan

3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten

Telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Renstra Kementerian/ Lembaga sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing. Telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dilakukan terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas, karena Bappelitbangda mempunyai tugas yang sama dengan Kementerian PPN/Bappenas yaitu Perencanaan Pembangunan. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah dan kebijakan pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas di tahun rencana dengan tugas pokok fungsi Bappelitbangda, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappelitbangda ditinjau dari sasaran jangka menengah dan kebijakan Renstra Kementerian PPN/Bappenas. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Kementerian PPN /Bappenas.

Adapun Renstra Kementerian PPN / Bappenas yang memuat visi *“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*.

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional, terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner serta terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel dan professional didukung oleh kapabilitas SDM.

Berkaitan dengan pelaksanaan visi dan misi yang dituangkan kedalam sasaran strategis tersebut perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian Misi Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021- 2026, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sasaran Strategis Renstra PPN/Bappenas	Tugas Pokok Bappeda	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah	Belum maksimalnya kemampuan dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan	1. Tidak tertibnya laporan perangkat daerah pada ketetapan waktu dalam proses penetapan dokumen perencanaan. 2. Masih lemahnya kerjasama dalam pengelolaan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel	Bappelitbangda telah diamanatkan dalam regulasi untuk menjamin ketepatan sasaran pembangunan daerah. Adanya pelibatan masyarakat (<i>stakeholder</i>) dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan
Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional		Belum optimalnya tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.	Belum maksimalnya tugas dan fungsi aparatur Bappelitbangda dalam memberikan pelayanan. Masih lemahnya Bappelitbangda dalam mengordinasikan peningkatan kualitas datad an informasi melalui sistem satu data.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap visi dan misi Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung data base yang lebih baik serta memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda.
Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner		Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah	Kurangnya koordinasi antar Kementerian / Lembaga, antar pusat dan daerah serta sistem informasi pusat yang tidak operasional	Komitmen aparatur Bappeda terhadap penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas
Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel dan professional didukung oleh kapabilitas SDM		Masih rendahnya tata Kelola dan tata kerja Aparatur	Masih lemahnya kualitas maupun kompetensi SDM	Adanya ketersediaan SDM

3.3 Hasil Telaahan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun telaahan terhadap Renstra Bappelitbang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan factor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappelitbangda ditinjau dari sasaran jangka menengah. Selanjutnya faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan terhadap Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 3.3
Hasil Telaahan Renstra Bappelitbang Provinsi Sulawesi Selatan

Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappelitbangda	Tugas Pokok Bappeda	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah	Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan yang terdiri dari kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan	Belum maksimalnya alat bantu teknologi sistem informasi yang memudahkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi secara komprehensif yang terintegrasi dengan sistem perencanaan	Adanya regulasi yang mengatur pengendalian dan evaluasi perencanaan yang dipedomani
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah		Masih rendahnya integrasi perencanaan antar Perangkat Daerah	Masih rendahnya kepedulian pejabat eselon untuk Menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan regulasi	Adanya tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur

3.4 Penentuan Isu isu Strategis Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang

Analisis isu isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan perangkat daerah dalam melengkapi tahapan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya . Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan yang dihadapi dalam pembangunan. Isu isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang.

Sebuah kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang jika tidak diantisipasi akan menimbulkan dampak kerugian yang besar atau sebaliknya, dalam hal jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dalam hal ini isu isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM perencanaan
2. Keselarasan dokumen perencanaan OPD dan dokumen perencanaan lainnya
3. Ketepatan waktu tersedianya dokumen perencanaan OPD dan dokumen perencanaan lainnya
4. Keterserapan usulan masyarakat melalui musrenbang
5. Ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan, pengintegrasian perencanaan dan penganggaran berbasis Teknologi Informasi (IT)
6. Terbatasnya sumberdaya yang berkompeten dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
7. Pemanfaatan hasil kajian/penelitian
8. Pengembangan inovasi daerah
9. Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4,1 Tujuan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 berdasarkan rumusan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.

4,2 Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain **berhasil**.

Sasaran yang akan dicapai oleh Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018- 2023 berdasarkan rumusan Misi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal 2021/2022	Target		
							2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas		Nilai Sakip Kabupaten Komponen Perencanaan Kinerja	Penilaian Kemenpan RB	Poin	60.30	62.60	68.82	72.44
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Program RPD - RKPD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase Konsistensi Program RKPD -APBD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam Mendukung Kinerja Pemerintah Saerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Penilaian APIP	Poin	BB	BB	A	A
2	Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang Inovatif		Indeks Inovasi Daerah	Penilaian Kemendagri	Poin	39.52	48.25 (Inovatif)	53.15 (Inovatif)	60.01 (Inovatif)
		Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti di kabupaten sidenreng rapping	Jumlah hasil penelitian yang ditindaklanjuti/jumlah kelitbangan yang dihasilkan x 100	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

CASCADING TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA

No	Tujuan OPD/IndikaTOR	Sasaran OPD/Indikator	Program/ Indikator	Kegiatan/ Indikator	Sub Kegiatan/ Indikator
				KEGIATAN 1: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SUB KEGIATAN 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				INDIKATOR : Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	INDIKATOR : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					SUB KEGIATAN 2: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD
					INDIKATOR : Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang disusun.
					SUB KEGIATAN 3: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD
					INDIKATOR : Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun
					SUB KEGIATAN 4: Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD
					INDIKATOR : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang disusun
					SUB KEGIATAN 5: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
					INDIKATOR : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan yang disusun

						SUB KEGIATAN 6: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						INDIKATOR Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
						SUB KEGIATAN 7: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						INDIKATOR Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	TUJUAN 1 OPD: Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	SASARAN 1 OPD Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KEGIATAN 2:Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		SUB KEGIATAN 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		SASARAN 2 OPD Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam mendukung akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				
	INDIKATOR Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Jangka Menengah Daerah dan Tahunan Daerah dengan Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kabupaten	INDIKATOR : Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR : Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah		INDIKATOR :Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				SUB KEGIATAN 2:Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Nilai Sakip Perangkat Daerah				INDIKATOR :Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Vertifikasi Keuangan SKPD

						SUB KEGIATAN 3: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun
						INDIKATOR :Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
						SUB KEGIATAN 4: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
						INDIKATOR :Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
					KEGIATAN 3: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	SUB KEGIATAN : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
					INDIKATOR :Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
					KEGIATAN 4: Administrasi Umum Perangkat Daerah	SUB KEGIATAN 1: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					INDIKATOR :Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah	INDIKATOR :Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
						SUB KEGIATAN 2: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						INDIKATOR :Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
						SUB KEGIATAN 3: Penyediaan Bahan Logistik Kantor

						INDIKATOR : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
						SUB KEGIATAN 4: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						INDIKATOR :Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
						SUB KEGIATAN 5 : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
						INDIKATOR :Jumlah Dokumen dan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
						SUB KEGIATAN 6: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						INDIKATOR :Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						SUB KEGIATAN 7: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
						INDIKATOR :Waktu Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
						SUB KEGIATAN 8: Penyediaan Bahan/Material
						INDIKATOR :Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
					KEGIATAN 5 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SUB KEGIATAN 1: Pengadaan Mebel

					INDIKATOR :Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	INDIKATOR :Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
						SUB KEGIATAN 2: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						INDIKATOR :Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
					KEGIATAN 6 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SUB KEGIATAN 1: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					INDIKATOR :Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan	INDIKATOR :Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						SUB KEGIATAN 2: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						INDIKATOR :Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
						SUB KEGIATAN 3: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
						INDIKATOR : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
					KEGIATAN 7 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SUB KEGIATAN 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					INDIKATOR : Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	INDIKATOR :Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

					INDIKATOR : Jumlah Berita Acara Musrembang Kabupaten/Kota
					SUB KEGIATAN 5: Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
					INDIKATOR : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan
					SUB KEGIATAN 6: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
					INDIKATOR : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)
TUJUAN 1 OPD: Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas serta penelitian dan pengembangan yang inovatif	SASARAN 1 OPD Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	KEGIATAN 2: Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	SUB KEGIATAN : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
INDIKATOR Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Jangka Menengah Daerah dan Tahunan Daerah dengan Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kabupaten	INDIKATOR :Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD	INDIKATOR : Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	INDIKATOR : Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	
	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	INDIKATOR :Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD	KEGIATAN 3: Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	SUB KEGIATAN : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	

				INDIKATOR :Persentase Rata Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	INDIKATOR : Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
			Nilai Sakip Perangkat Daerah			
					KEGIATAN 1: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	SUB KEGIATAN 1: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					INDIKATOR : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD - Renstra, RKPD - Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	INDIKATOR : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)
						SUB KEGIATAN 2: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
						INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
						SUB KEGIATAN 3: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

											INDIKATOR : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
											SUB KEGIATAN 4: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
											INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
											SUB KEGIATAN 5: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
											INDIKATOR : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
											SUB KEGIATAN 6: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
											INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

					SUB KEGIATAN 7 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
					INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
					SUB KEGIATAN 8 : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
					INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia
	TUJUAN 1 OPD: Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas serta penelitian dan pengembangan yang inovatif	SASARAN 1 OPD Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEGIATAN 2: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	SUB KEGIATAN 1: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	INDIKATOR Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Jangka Menengah Daerah dan Tahunan Daerah dengan Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kabupaten	INDIKATOR : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD - Renstra, RKPD - Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	INDIKATOR : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD - Renstra, RKPD - Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	INDIKATOR : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	INDIKATOR : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD - Renstra, RKPD - Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA		SUB KEGIATAN 2: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	INDIKATOR : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD - Renstra, RKPD - Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
					SUB KEGIATAN 3: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
					INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
					SUB KEGIATAN 4: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
					INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian

					KEGIATAN 3: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Wilayah (Sumber Daya Alam)	SUB KEGIATAN 1: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD - Renstra, RKPD - Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	INDIKATOR : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						SUB KEGIATAN 2: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
						INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
						SUB KEGIATAN 3: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
						INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
						SUB KEGIATAN 4: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

											INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur
											SUB KEGIATAN 5: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
											INDIKATOR : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
											SUB KEGIATAN 6: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
											INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
											SUB KEGIATAN 7 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
											INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

					SUB KEGIATAN 4: Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan Dan Asset Daerah, Reformasi Birokrasi
					INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
					SUB KEGIATAN 5: Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data Dan Pengkajian Peraturan
					INDIKATOR : Jumlah Laporan Hasil Pelaksana Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
	TUJUAN 2 Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan	SASARAN 2 Meningkatkan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEGIATAN 2: Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	SUB KEGIATAN 1 : Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
	INDIKATOR Tingkat Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Indeks Inovasi Daerah	INDIKATOR :Persentase Hasil Litbang Yang Di Manfaatkan oleh Perangkat Daerah	INDIKATOR : Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	INDIKATOR : Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Analisis Pengembangan Pariwisata yang di hasilkan
		Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan yang ditindaklanjuti di kabupaten sidenreng rappang	INDIKATOR :Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi		SUB KEGIATAN 2 : Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
					INDIKATOR : Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Analisis Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang yang dihasilkan

						SUB KEGIATAN 3 : Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial
						INDIKATOR : Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek aspek sosial
						SUB KEGIATAN 4 : Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						INDIKATOR : Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil
					KEGIATAN 3 : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	SUB KEGIATAN 1 : Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup
					INDIKATOR : Persentase hasil kelitbang bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	INDIKATOR : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
					KEGIATAN 4 : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	SUB KEGIATAN 1 : Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
					INDIKATOR : Persentase inovasi yang dihasilkan Perangkat Daerah	INDIKATOR : Jumlah dokumen hasil Penelitian, pengembangan dan perencanaan di bidang teknologi dan inovasi
						SUB KEGIATAN 2 : Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (*grand design*), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Strategi jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat;
2. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
3. Mengembangkan sistem informasi manajemen data dan informasi pembangunan non spasial dan spasial;
4. Mengembangkan penelitian dan pengembangan berdasarkan permasalahan pembangunan.

5..2. ARAH KEBIJAKAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Arah kebijakan jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelaksanaan program pembangunan melalui integrasi perencanaan, penganggaran dan kerjasama pendanaan pembangunan;
2. Peningkatan Ketersediaan data dan informasi pembangunan berbasis teknologi informasi;
3. Peningkatan hasil penelitian yang dimanfaatkan melalui Analisis Kebijakan Strategi Daerah serta inovasi dan teknologi.

4. Peningkatan pelaksanaan program pembangunan melalui integrasi perencanaan, penganggaran dan kerjasama pendanaan pembangunan;
5. Peningkatan Ketersediaan data dan informasi pembangunan berbasis teknologi informasi;
6. Peningkatan hasil penelitian yang dimanfaatkan melalui Analisis Kebijakan Strategi Daerah serta inovasi dan teknologi.

2. Table 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Menjamin konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan dengan membangun Koordinasi dan Sinergitas untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Pengembangan system integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan berbasis elektronik	Peningkatan kapasitas aparatur perencanaan melalui bimtek, diklat dengan bekerjasama Lembaga yang kredibel dan kompeten	Penataan kelembagaan dan organisasi serta peningkatan kompetensi dan professional sumber daya aparatur
2.	Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan Yang Inovatif	Meningkatnya Kualitas penelitian dan Pengembangan	Mendorong Perangkat Daerah Untuk dimanfaatkan hasil kelitabngan dan mendorong inovasi daerah	Peningkatan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan berbasis kelitabngan dan inovasi daerah	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mempercepat peningkatan pelayanan public, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah	Penguatan fasilitasi terhadap aktifitas perencanaan dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

a.1. Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Pada perubahan dokumen renstra saat ini merupakan instrumen kebijakan yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang akan dan harus dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

I. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - b. Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - 3). Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4). Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Penatausahaan arsip dinamis pada skpd

- 5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Pengadaan Mobiler
- 6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- 1). Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - a. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
 - b. Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - c. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - d. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - e. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - f. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 2). Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3). Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1). Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - a. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPD dan RKPD)
 - f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

- g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 2). Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPD dan RKPD)
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPD dan RKPD)
 - f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- 3). Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPD dan RKPD)
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
 - f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
 - g. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Kelitbangan

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

- 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - a. Fasilitasi ,pelaksanaan dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan

Otonomi Daerah

- b. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - c. Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan asset daerah, reformasi birokrasi
 - d. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan
 - e. Perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan
- 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- a. Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- a. Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup
- 4) Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- a. Penelitian, pengembangan dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi
 - b. Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi penerapan teknologi
 - c. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

6.2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal

Tujuan	Sasaran	Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan,Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Data Capaian pada awal tahun perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahu Ke -						Kondisi Akhir Periode Renstra OPD	Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
									Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp (00)	Target	Rp (00)	Target	Rp (00)			
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19	20	21
		5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		100%	100%	100%	5,536,570,349	100%	5,591,936,052	100%	5,647,855,413	16,776,361,814		
		01			PERENCANAAN		100%	100%	100%	5,036,570,349	100%	5,086,936,052	100%	5,137,805,413	15,261,311,814		
Mewujudkan Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%	4,136,570,349	100%	4,177,936,052	100%	4,219,715,413	12,534,221,814	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
				201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	100%	100%	100%	21,500,349	100%	21,715,352	100%	21,932,506	65,148,207		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	24 Dok	8 Dok	8 Dok	15,000,000	8 Dok	15,150,352	8 Dok	15,301,856	45,452,208		
				02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	15 Lap	5 Lap	5 Lap	3,500,000	5 Lap	3,535,000	5 Lap	3,570,350	10,605,350		
				03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Lap	4 Lap	4 Lap	3,000,349	4 Lap	3,030,000	4 Lap	3,060,300	9,090,649		
				04	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	3,521,786,019	100%	3,557,003,879	100%	3,592,573,918	10,671,363,816		
				05	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang x 42 Bulan	46 Orang x 14 Bulan	46 Orang x 14 Bulan	3,496,786,019	46 Orang x 14 Bulan	3,531,753,879	46 Orang x 14 Bulan	3,567,071,418	10,595,611,316		
				06	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	20,000,000	12 Dokumen	20,200,000	12 Dokumen	20,402,000	60,602,000		

					07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	5,000,000	18 Laporan	5,050,000	18 Laporan	5,100,500	15,150,500		
					202	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	4,000,000	100%	4,040,000	100%	4,080,400	12,120,400		
					01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4,000,000	12 Laporan	4,040,000	12 Laporan	4,080,400	12,120,400		
					03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%	116,400,000	100%	117,564,000	100%	118,739,640	343,613,340		
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	4 Paket	4 Paket	4,000,000	4 Paket	4,040,000	4 Paket	4,080,400	12,120,400		
					07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	4 Paket	4,000,000	4 Paket	4,040,000	4 Paket	4,080,400	12,120,400		
					203	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5,400,000	5 Dokumen	5,454,000	5 Dokumen	5,508,540	16,362,540		
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1242 Laporan	180 Laporan	180 Laporan	100,000,000	180 Laporan	101,000,000	180 Laporan	102,010,000	303,010,000		
					10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	66 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3,000,000	12 Dokumen	3,030,000	12 Dokumen	3,060,300	9,090,300		
					206	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	25,000,000	100%	25,250,000	100%	25,502,500	75,752,500		
					01	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Paket	5 Paket	10 Paket	10,000,000	10 Paket	10,100,000	10 Paket	10,201,000	30,301,000		
					02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit	10 Unit	20 Unit	15,000,000	20 Unit	15,150,000	20 Unit	15,301,500	45,451,500		
					04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	341,999,651	100%	345,419,648	100%	348,873,844	1,036,293,142		

					01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	7 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	28,000,000	2 dokumen	28,280,000	2 dokumen	28,562,800	84,842,800			
						Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	7 dokumen		3 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,250,000	2 dokumen	25,502,500	75,752,500			
					02	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	6 Berita Acara	1 Berita Acara	2 Berita Acara	40,000,000	2 Berita Acara	40,400,000	1 Berita Acara	40,804,000	121,204,000			
					04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	20,000,000	2 Berita Acara	20,200,000	1 Berita Acara	20,402,000	60,602,000			
				209		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	70,000,000	3 Berita Acara	70,700,000	1 Berita Acara	71,407,000	212,107,000			
					01	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	4200 Usulan	1400 Usulan	1420 Usulan	25,000,000	1400 Usulan	25,250,000	1460 Usulan	25,502,500	75,752,500			
					09	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	9 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	175,000,000	4 Dokumen	176,750,000	2 Dokumen	178,517,500	530,267,500			
					11	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	67,000,000	100%	67,670,000	100%	68,346,700	203,016,700			
						Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	12 Dokumen	4 Masukan Dokumen	3 Dokumen	67,000,000	4 Dokumen	67,670,000	2 Dokumen	68,346,700	203,016,700			
						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	50,000,000	100%	50,500,000	100%	51,005,000	151,505,000			
					201	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	18 Laporan		8 Laporan	50,000,000	7 Laporan	50,500,000	6 Laporan	51,005,000	151,505,000			

Mewujudkan Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah				0 1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%		100%					Bidang Perencanaa n Perekonomi an,SDA dan Pembangun an Manusia dan Bidang Perencanaa n Infrastrukt ur, Kewilayah an dan Pemerintah an	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah				0 3		Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%	100%	400,000,000	100%	404,000,000	100%	408,040,000	1,212,040,000	Bidang Perencanaa n Perekonomi an,SDA dan Pembangun an Manusia	Pangk ajene Sidenr eng
					0 4		Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	100%	100%		100%		100%			Bidang Perencanaa n Infrastrukt ur,Kewilayah an dan Pemerintah an	
					0 5	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	95,000,000	100%	95,950,000	100%	96,909,500	287,859,500	Bidang Perencanaa n Perekonomi an,SDA dan Pembangun an Manusia	
					0 6	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	144 Dokum en	48 Dokumen	48 Dokum en	5,000,000	48 Dokume n	5,050,000	48 Doku men	5,100,500	15,150,500		
					0 7	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	144 Lapora n	48 Laporan	48 Lapora n	5,000,000	48 Laporan	5,050,000	48 Lapora n	5,100,500	15,150,500		

				2 0 2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	36 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	10,000,000	48 Laporan	10,100,000	48 Laporan	10,201,000	30,301,000		
				0 1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	36 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	30,000,000	48 Laporan	30,300,000	48 Laporan	30,603,000	90,903,000		
				0 2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	48 Dokumen	3 Dokumen	16 Dokumen	10,000,000	16 Dokumen	10,100,000	16 Dokumen	10,201,000	30,301,000		
				0 3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	48 Laporan		16 Laporan	5,000,000	16 Laporan	5,050,000	16 Laporan	5,100,500	15,150,500		
				2 0 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	48 Laporan		16 Laporan	10,000,000	16 Laporan	10,100,000	16 Laporan	10,201,000	30,301,000		
				0 1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	48 Laporan	6 Laporan	16 Laporan	20,000,000	16 Laporan	20,200,000	16 Laporan	20,402,000	60,602,000		
				0 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%	100%	155,000,000	100%	156,550,000	100%	158,115,500	469,665,500		Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA dan Pembangunan Manusia

				03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	48 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	15,000,000	16 Dokumen	15,150,000	16 Dokumen	15,301,500	45,451,500		
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	48 Laporan		16 Laporan	10,000,000	16 Laporan	10,100,000	16 Laporan	10,201,000	30,301,000		
			03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	48 Laporan		16 Laporan	5,000,000	16 Laporan	5,050,000	16 Laporan	5,100,500	15,150,500		
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	48 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	10,000,000	16 Laporan	10,100,000	16 Laporan	10,201,000	30,301,000		
				201	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	48 Laporan	16 Dokumen	16 Dokumen	5,000,000	16 Dokumen	5,050,000	16 Dokumen	5,100,500	15,150,500		
				01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	48 Laporan		16 Laporan	5,000,000	16 Laporan	5,050,000	16 Laporan	5,100,500	15,150,500		
				02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	48 Laporan		16 Laporan	5,000,000	16 Laporan	5,050,000	16 Laporan	5,100,500	15,150,500		
				03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	48 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100,000,000	16 Laporan	101,000,000	16 Laporan	102,010,000	303,010,000		

						04	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan (RPD - Renstra, RKPD - Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%	150,000,000	100%	151,500,000	100%	153,015,000	454,515,000	Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan dan Pemerintahan
						05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	5,000,000	20 Dokumen	5,050,000	20 Dokumen	5,100,500	15,150,500	
						06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	60 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	5,000,000	20 Laporan	5,050,000	20 Laporan	5,100,500	15,150,500	
						07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	60 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20,000,000	20 Laporan	20,200,000	20 Laporan	20,402,000	60,602,000	
						08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur	60 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	45,000,000	20 Laporan	45,450,000	20 Laporan	45,904,500	136,354,500	
						202	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	156 Dokumen	9 Dokumen	52 Dokumen	5,000,000	52 Dokumen	5,050,000	52 Dokumen	5,100,500	15,150,500	
						01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	156 Laporan	52 Laporan	52 Laporan	5,000,000	52 Laporan	5,050,000	52 Laporan	5,100,500	15,150,500	

					02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	156 Laporan	52 Laporan	52 Laporan	20,000,000	52 Laporan	20,200,000	52 Laporan	20,402,000	60,602,000		
					03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan	156 Laporan	52 Laporan	52 Laporan	45,000,000	52 Laporan	45,450,000	52 Laporan	45,904,500	136,354,500		
					04	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					500,000,000		505,000,000		510,050,000	1,515,050,000		
Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang Inovatif	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan				05	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah	100%	100%	100%	500,000,000	100%	505,000,000	100%	510,050,000	1,515,050,000	Bidang Penelitian & Pengembangan Daerah	Pangkajene Sidenreng
							Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi	100%	100%	100%		100%		100%				
					06	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	300,000,000	100%	303,000,000	100%	306,030,000	909,030,000		
					01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	51,000,000	1 Laporan	51,005,000	151,505,000		
					03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,000,000	1 Laporan	50,500,000	2 Laporan	51,005,000	151,505,000		
					2035	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	50,500,000	1 Laporan	51,005,000	151,505,000		

				1 2	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terekelolah dengan baik	3 Lapora n	1 Laporan	1 Lapora n	75,000,000	1 Laporan	50,500,000	1 Lapora n	51,005,000	151,505,000			
				1 3	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas rencana penetapan Peraturan Basru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	4 Rekom endasi		2 Rekom endasi	50,000,000	2 Rekomen dasi	50,500,000	2 Rekom endasi	51,005,000	151,505,000			
				1 4	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksana Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	3 Lapora n	1 Laporan	1 Lapora n	50,000,000	1 Laporan	50,500,000	1 Lapora n	51,005,000	151,505,000			
				2 0 2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan Perangkat Daerah	100%	100%				100%	50,500,000		50,500,000			
				0 2	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokum en					1 Dokume n	50,500,000		50,500,000			
				2 0 3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan Perangkat Daerah	100%	100%				100%	50,500,000	100%	51,005,000	151,505,000		
				0 7	Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 Dokum en					1 Dokume n	50,500,000	1 Doku men	51,005,000	151,505,000		
				2 0 4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah	100%		100%	100,000,000		100%	101,000,000	100%	153,015,000	354,015,000		
				0 7	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Lapora n					1 Laporan		1 Lapora n				
				0 1	Penelitian, Pengembangan dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian, pengembangan dan perakayasaan di bidang teknologi dan inovasi	3 Lapora n	1 Laporan	1 Lapora n	50,000,000		1 Laporan	50,500,000	1 Lapora n	51,005,000	151,505,000		

				0 2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jmlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan rancang bangun /model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	10 Lapora n	5 Laporan	5 Lapora n	25,000,000	3 Laporan	25,250,000	2 Lapora n	52,010,000	102,260,000		
					Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	5 Lapora n	3 Laporan	3 Lapora n	25,000,000	2 Laporan	25,250,000	1 Lapora n	50,000,000	100,250,000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang yang menunjukkan secara langsung keluaran (*output*) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023. Indikator Kinerja Utama atau variabel utama kinerja yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja makro Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai variabel yang dipengaruhi oleh indikator kinerja bidang/satuan unit kerja Bappeda dan merupakan core bussines Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Perencanaan, Penganggaran Dan Pengendalian Program Pembangunan dan Indikator Kinerja Pendukungnya atau variabel pendukung yang merupakan indikator kinerja bidang/satuan unit kerja yang mempengaruhi dan mendukung terhadap pencapaian indikator kinerja Bappeda adalah Penelitian Dan Pengembangan serta Data Dan Informasi Pembangunan.

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Sidenreng Rappang, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Bappedlitbangdaa Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan Program Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan, Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan, Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Program Penelitian dan Pengembangan, Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten adalah sebagai berikut :

6	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Hasil Litbang yang Dimanfaatkan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.1 adalah indikator yang bersumber dari tujuan dan sasaran Dokumen RPD Tahun 2024-2026. Indikator-indikator tersebut adalah Indikator Kinerja Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII

PENUTUP

Renstra yang disusun Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Namun meskipun demikian, Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan renstra ini, agar target yang direncanakan dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026.